



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Tiana Raharni Putri

0221 18 273

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2022**



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada ~~Fakultas~~ <sup>Bogor</sup> Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

~~Mengajukan~~

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA)



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari : Senin, 25 Juli 2022

Tiana Raharni Putri

0221 18 273

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Ernadh Sudarmanto, Ak., CFE, CfrA.)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sigit Edy Suro, Drs., MM)



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Tiana Raharni Putri**

**NPM : 0221 18 273**

**Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas  
adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan  
dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.**

**Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak  
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam  
Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.**

**Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada  
Universitas Pakuan.**

**Bogor, 25 Juli 2022**



**Tiana Raharni Putri**

**0221 18 273**

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

TIANA RAHARNI PUTRI. 022118273. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020. Di bawah bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan SIGIT EDY SURONO. 2022.

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara atau daerah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat dan produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sekunder yang bersumber dari laporan situs resmi Kota Bogor menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Determinasi, Uji Statistik F dan Uji Statistik t dengan menggunakan SPSS versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

**Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi**

## ABSTRACT

*TIANA RAHARNI PRINCESS. 022118273. The Effect of Capital Expenditure and Regional Original Income (PAD) on Economic Growth in Bogor City in 2015-2020. Under the guidance of: ERNADHI SUDARMANTO and SIGIT EDY SURNO. 2022.*

*Economic growth is one of the important indicators to see the success of economic development in a country or region. An economy is said to be experiencing economic growth if the amount of production of goods and services increases and the gross regional domestic product is one of the important indicators to determine the economic conditions in an area within a certain period, both on the basis of current prices and on the basis of constant prices. The purpose of this research is to see the effect of Capital Expenditure and Regional Original Income (PAD) on Economic Growth.*

*This study uses quantitative and secondary data sourced from the official website of Bogor City using purposive sampling method. The analytical method used is the Classical Assumption Test consisting of Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test, Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis Testing consisting of Determination Test, F Statistics Test and t Statistics Test using SPSS version 25.*

*The results of this study indicate that Capital Expenditure has a significant effect on Economic Growth while Regional Original Income (PAD) has no significant effect on Economic Growth. The test results simultaneously state that Capital Expenditures and Regional Original Income (PAD) have a significant effect on Economic Growth in the City of Bogor. It is hoped that this research can be useful in formulating effective and efficient strategic policies for activities to stimulate Economic Growth in Bogor City.*

*Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Income (PAD), Economic Growth*

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Tenti Arlini dan Ayah tercinta Iman Rahardjo yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya dan berjuang demi anak-anaknya. Serta Adik tersayang Ardityo Rahardjo yang selalu memberikan semangat serta membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., CFE., CFrA Selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak Sigit Edy Suro, Drs., MM. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan banyak semangat selama penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk hal yang lebih baik. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 25 Juli 2022

Penulis,

Tiana Raharni Putri

# DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Maksud Penelitian .....	5
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1. Kegunaan Praktis .....	6
1.4.2. Kegunaan Akademis .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.2. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
2.2.1. Pengertian Belanja Modal.....	7
2.2.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.3.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto .....	14
2.4. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran .....	15
2.4.1. Penelitian Terdahulu.....	15
2.4.2. Kerangka Pemikiran .....	21
2.5. Hipotesis Penelitian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Jenis Penelitian .....	23

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	23
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	23
3.4. Operasional Variabel .....	24
3.5. Pengertian Rasio .....	25
3.5.1. Rasio Aktivitas Belanja Modal.....	26
3.5.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	26
3.5.3. Rasio Pertumbuhan Ekonomi .....	26
3.6. Metode Penarikan Sampel .....	27
3.7. Metode Pengumpulan Data .....	27
3.8. Metode Pengolahan/Analisis Data.....	27
3.9. Pengujian Hipotesis .....	29
3.9.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	29
3.9.2. Uji Signifikan Simultan (Uji $F$ ).....	30
3.9.3 Uji Signifikan Parsial (Uji- $t$ ) .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor .....	31
4.1.2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang.....	32
4.1.3. Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor .....	34
4.2. Analisis Data.....	40
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	40
4.2.2. Analisis Regresi Berganda.....	44
4.2.3. Uji Hipotesis .....	45
4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian .....	47
4.3.1. Pembahasan .....	47
4.3.2. Interpretasi Hasil Penelitian .....	48
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	2
Tabel 1.2 Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	35
Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 .....	36
Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 ...	36
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 .....	37
Tabel 4.5 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	40
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi .....	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Berganda.....	44
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	45
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	46
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	46
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis .....	47

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi ...	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor.....	33
Gambar 4.2 Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	35
Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 .....	37
Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020.....	39
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi .....	41
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Hasil perhitungan SPSS versi 25 .....	57
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015 ...	61
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2016 ...	62
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 ...	63
Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 ...	64
Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 ...	65
Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 ...	66
Lampiran 8 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bogor Tahun 2015-2017 ....	67
Lampiran 9 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bogor Tahun 2018-2020 ....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama priode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan suatu negara atau bisa diartikan sebagai salah satu indikator penting untuk menggambarkan kemajuan sebuah negara secara finansial atau sejahtera.

Salah satu indikator utama perekonomian yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu. Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa disimpulkan semakin makmur dan semakin baik daerah tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus baik pula. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah yang meningkat merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat. PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Saragih (2003), daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif memiliki kemungkinan kenaikan PAD atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan diantara pertumbuhan ekonomi dan PAD diyakini terdapat adanya korelasi.

Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya (Maryati, 2010:69). Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Peningkatan pendapatan asli daerah harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003:58).

Selain pendapatan asli daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode, yang dikatakan belanja modal termasuk; belanja tanah, belanja peralatan dan mesin belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nasution, 2017) menyatakan bahwa dari “pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang negatif, disebabkan PDRB Lapangan Usaha menurut harga berlaku dan harga konstan kota bogor masih sedikit masyarakat memiliki indikator PDRB Lapangan Usaha menurut harga berlaku dan harga konstan seperti lahan pertanian, jasa pendidikan, infrastruktur sarana dan prasarana, dan lain-lain sehingga minusnya angka PDRB Kota Bogor belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor”.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, berikut merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi kota bogor:

Tabel 1.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor  
Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	PDRB Atas Dasar HargaKonstan	Pertumbuhan Ekonomi
2015	252,98	6,14%
2016	270,02	6,73%
2017	286,54	6,12%
2018	304,13	6,14%
2019	322,50	6,05%
2020	320,83	-0,53%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015-2020

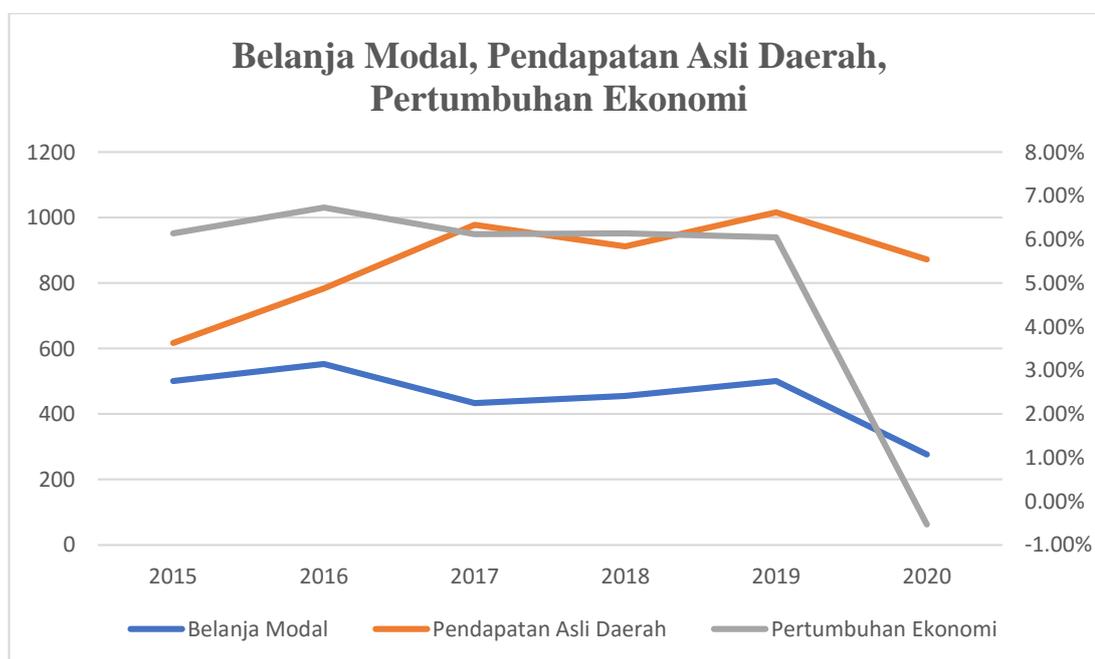
Pada tabel 1.1 di atas pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bogor Tahun 2015-2020. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 6,73%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami penurunan dengan jumlah persentase 6,12%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,14%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi terendah yaitu terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah presentase -0,53%.

Tabel 1.2 Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Ekonomi
2015	500,64	617,06	6,14%
2016	552,48	783,87	6,73%
2017	433,49	978,20	6,12%
2018	455,46	912,20	6,14%
2019	500,98	1.015,88	6,05%
2020	276,16	872,07	-0,53%

Sumber: APBD dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2015-2020

Gambar 1.1 – Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti belanja modal dan pendapatan asli daerah yang di dapat oleh daerah tersebut. Berdasarkan Tabel 1.2 belanja modal di Kota Bogor selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 belanja modal di Kota Bogor sebesar 500,64 miliar rupiah, di tahun 2016 belanja modal mengalami kenaikan sebesar 552,48 miliar rupiah. Pada tahun 2017 belanja modal mengalami penurunan sebesar 433,49 miliar rupiah. Pada tahun 2018 dan 2019 belanja modal kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 455,46 miliar rupiah di tahun 2018 dan sebesar 500,98 miliar rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan sebesar 276,16 miliar rupiah.

Selain dari belanja modal terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah di Kota Bogor selama enam tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015-2017 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor mengalami kenaikan secara berturut-turut. Pada tahun 2015 sebesar 617,06 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 783,87 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 978,20 miliar rupiah. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mulai mengalami penurunan sebesar 912,20 miliar rupiah. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor mengalami kenaikan kembali sebesar 1.015,88 triliun rupiah. Pada tahun 2020 terakhir Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 872,087 miliar rupiah.

Fenomena dari penelitian ini yaitu, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mengalami penurunan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di kota bogor mengalami kenaikan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 belanja modal dan pendapatan asli daerah di kota bogor secara bersama mengalami kenaikan sedangkan pertumbuhannya mengalami penurunan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wardhiah, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh” bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palguno & Valeriani, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018” bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan, belanja modal ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Harsono, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan” bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama- sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermansyur & Aditi, 2017) dalam jurnalnya yang berjudul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara” bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amal, Haharuddin dan Junaidin, 2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar” bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi”

Alasan peneliti memilih penelitian pada kota bogor adalah karena adanya keterbatasan peneliti dalam menjangkau kota lain. Selain itu, sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bogor sampai dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya sebesar -0,53%, sehingga penelitian ini sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui ataupun membuktikan seberapa signifikan pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bogor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015- 2020”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan antara variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adanya ketidak konsistenan dari peneliti terdahulu, tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015- 2020?
3. Apakah belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, menganalisis data tersebut dengan metode-metode yang tepat, lalu mengambil kesimpulan apakah terdapat pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini juga berusaha agar dapat memberi saran terkait dengan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020
3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi agar lebih dapat mengetahui seberapa besar Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademis**

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau akademik, dan dapat dijadikan referensi ataupun tambahan data bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama serta dapat meningkatkan kemajuan di bidang akuntansi pemerintahan pada khususnya, serta di bidang akuntansi umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik.

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Dwi Ratmono (2015) yaitu Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

#### **2.2. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **2.2.1. Pengertian Belanja Modal**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD. Belanja modal yaitu belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan fasilitas pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana dari pembangunan daerah. Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) ada beberapa jenis-jenis yang termasuk dalam belanja modal adalah sebagai berikut:

- Belanja Tanah

Belanja tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian balik nama, sewa tanah, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tersebut siap digunakan.

- Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat dari dua belas bulan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

- Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJII$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Banguna

BJII = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

### **2.2.1.1. Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan meningkat pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

### **2.2.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan ialah indikator dari pembentukan laba, diukur sesuai prinsip pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, kemudian akan dibandingkan dengan laporan keuangan serta disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Permasalahan utama pendapatan adalah bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, apabila penerapan tersebut sesuai transaksi dan PSAK No.27 yang merupakan faktor mempengaruhi laporan keuangan dan diakui dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dengan penurunan aset dan diukur dengan profesional (Suarni, A dan Sulastri, 2018).

Pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

Indikator variabel Pendapatan Asli Daerah ini dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah  
 PPD : Pendapatan Pajak Daerah  
 PRD : Pendapatan Retribusi Daerah  
 LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan  
 HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Pembangunan daerah yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan indikator produk domestik regional bruto diartikan pula sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. (Taufik, 2009).

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran hiburan, reklame, penerangan jalan dan parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan dan setiap jenis memiliki bagiannya masing-masing.

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat Dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap Mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Salah satu unsur pendapatan asli daerah yang utama adalah pajak daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkat penerimaan pajak daerah, maka pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah tersebut akan meningkat juga, begitu pun sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah termasuk salah satu dasar sumber penerimaan keuangan dalam suatu daerah maupun negara, selain dari itu penerimaan keuangan daerah juga bersumber dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain, termasuk juga penerimaan yang sah dari sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

#### **2.2.2.1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi Pendapatan Asli Daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat yang menambah kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung per kapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya sebuah proses pembangunan tergantung dari sejauh mana sumber daya manusianya dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.

b) Sumber Daya Alam (SDA)

Setiap Negara memiliki sumber daya alam yang berbeda- beda, baik itu sumber daya alam dari hasil tanah, hasil tambang, kekayaan laut dan kekayaan mineral. Sumber daya alam ini tidak dapat menjamin suatu keberhasilan apabila tidak di dukung oleh sumber daya manusianya.

c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa dikenal dengan IPTEK yang semakin lama semakin pesat yang mampu mendorong adanya percepatan proses pembangunan di suatu daerah, dapat dilihat dari banyaknya mesin-mesin canggih yang ada sekarang. Hal ini akan menimbulkan dampak yang baik pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

d) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi

e) Budaya

Faktor budaya ini berfungsi sebagai pendorong bagi jalannya sebuah proses pembangunan, seperti adanya sikap kerja keras, cerdas, ulet, jujur dan sebagainya. Namun faktor ini jga dapat menjadi penghambat jalannya sebuah proses pembangunan di daerah, seperti adanya sikap anarkis, egois, boros dan sebagainya.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2015). Berikut ini adalah rumus menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi:

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

### 2.3.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah. PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Berikut rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + G + I (X-M)$$

Keterangan:

Y: Pendapatan nasional

G = Pengeluaran pemerintah

C: Konsumsi rumah tangga

X = Ekspor

I: Investasi

M = Impor

## 2.4. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mutmainah (2020), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Tanah + Belanja Peralatan Dan Mesin + Belanja Gedung Dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya  Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.  PDRBt- PDRBt-1/ PDRBt-1 x 100%	Kuantitatif	Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaan: - Variabel belanja modal - Variabel pendapatan asli daerah - Variabel pertumbuhan ekonomi - Metode penelitian  Perbedaan: - Lokasi Penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan - Periode tahun 2012-2019

2	Rijalul Ahmad Fikri (2017), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	<p>Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p><math>PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS</math></p> <p><math>BM = BT + BPM + BGB + BJIJ</math></p> <p><math>G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%</math></p>	Kuantitatif	Belanja modal dan Pendapatan asli daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel belanja modal</li> <li>- Variabel pendapatan asli daerah</li> <li>- Variabel pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Metode penelitian</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periode tahun 2013-2015</li> <li>- Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>
3	Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M.Koleangan, Vekie A. Rumat (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	PAD, DP, PE, Kemiskinan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pendapatan asli daerah</li> <li>- Variabel pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Metode penelitian</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian di Kota Bitung</li> <li>- Periode tahun penelitian 2019</li> </ul>

4	Megasari (2020) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	PAD, BM, PDRB, Indeks Pembangunan manusia, Tenaga kerja	Kuantitatif	Pendapatan Asli daerah dan Belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pendapatan asli daerah</li> <li>- Variabel belanja modal</li> <li>- Variabel pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Metode penelitian</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periode tahun 2011-2019</li> <li>- Lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Utara</li> </ul>
5	Wardiah (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>PAD = PD+RD+HPKD + Lain-lain PAD yang sah</p> <p>BM= BMT+BMPM+BMG</p> <p>B+ BMJIJ+BMFL</p> <p>Total PDRB ADHK=PDRB ADHK1 +PDRB ADHK2+PDRB ADHK3+PDRB ADHK4 +PDRB ADHK5+PDRB ADHK6+PD</p>	Survey	Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pendapatan asli daerah</li> <li>- Variabel belanja modal</li> <li>- Variabel pertumbuhan ekonomi.</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian di Provinsi Aceh</li> <li>- Metode Penelitian</li> <li>- Periode Tahun 2006-2009</li> </ul>

			RB ADHK7 +PDRB ADHK8+ PDRB ADHK9 Total PDRB ADHK			
6	Sulaeman & Silvia (2019), Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Regional	PAD, Transfer daerah (DAU, DBH, DAK), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Kuantitatif	PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaan: - Variabel pendapatan asli daerah - Variabel belanja modal - Variabel pertumbuhan ekonomi - Metode penelitian  Perbedaan: - Lokasi penelitian - Periode tahun 2013-2017
7	Rori, et. Al (2018), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD, PDRB	Ordinary Least Square (OLS) dengan metode analisis regresi sederhana	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 – 2013. Secara teori Apabila PAD naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan ikut naik.	Persamaan: - Variabel pendapatan asli daerah - Variabel pertumbuhan ekonomi  Perbedaan: - Lokasi penelitian di Sulawesi Utara - Periode tahun 2001-2013

						- Metode penelitian
8	Irmal Suandi (2016), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: PAD dan Dana Alokasi  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD, Dana Alokasi, PDRB	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.	Persamaan: - Variabel pendapatan asli daerah - Variabel pertumbuhan ekonomi - Metode penelitian  Perbedaan: - Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan - Periode tahun 2008-2013
9	Febriyanti (2021), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal = Aset Tetap, Layanan Publik  PAD = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.  Pertumbuhan	Kuantitatif	Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Persamaan: - Variabel belanja modal - Variabel pendapatan asli daerah - Variabel pertumbuhan ekonomi - Metode penelitian  Perbedaan: - Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara - Periode tahun

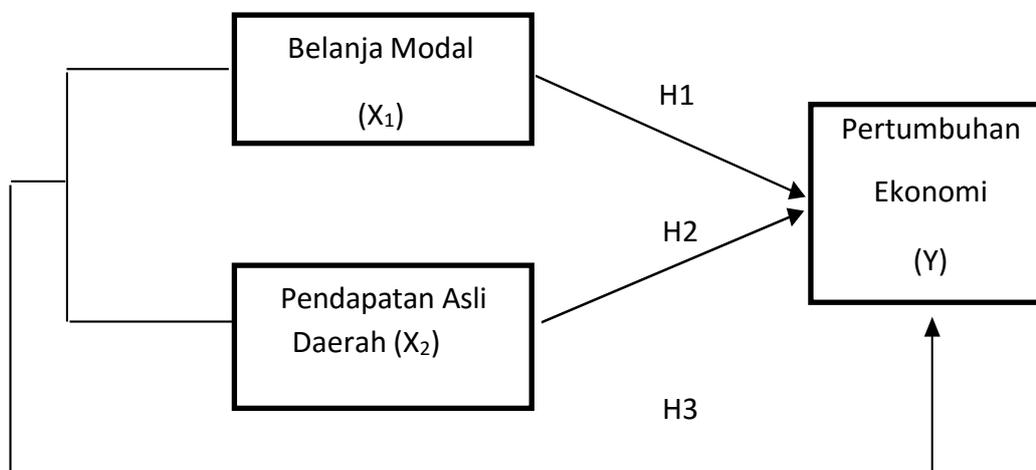
			Ekonomi = PDRB, Kemajuan teknologi, Pendapatan Rill Perkapita			
10	Rifda Atiqoh Daulay (2020), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$ $PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$ $G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$	Kuantitatif	Secara simultan ada pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel belanja modal</li> <li>- Variabel pendapatan asli daerah</li> <li>- Variabel pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Metode penelitian</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara</li> <li>- Periode tahun 2016-2019</li> </ul>

#### 2.4.2. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dokumen anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Arini S, 2016). Sementara belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam APBN atau APBD dengan tujuan kepentingan masyarakat. sehingga berdasarkan penelitian (Arini S, 2016) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Dari data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 2.1 – Kerangka Pemikiran

## **2.5. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berupa suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk maksud pengujian. Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020

H2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020

H3 = Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat diperoleh suatu hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian explanatory survey. Metode penelitian explanatory survey adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

#### **3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017: 38), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independent dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor sebagai variabel dependen.

Unit analisis penelitian ini dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah geografis regional, maksud dari geografis regional yang akan diteliti adalah daerah sehingga data berasal dari suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan sumber data penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan (Sugiyono, 2016: 225).

Data Sekunder diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)), sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Bogor (<https://bogorkota.bps.go.id/>).

### 3.4. Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### Variabel Bebas (Independent Variabel) (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal dan pendapatan asli daerah.

##### 1. Belanja Modal (X1)

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) belanja modal adalah belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan fasilitas pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor baik itu di sektor pendidikan, kesehatan maupun transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati saran dan prasarana dari pembangunan daerah tersebut.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJIJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

##### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). PAD dapat diukur dengan perhitungan:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

PPD: Pendapatan Pajak Daerah

PRD: Pendapatan Retribusi Daerah

LPS: Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD: Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan.

### **Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y)**

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah:

#### 3. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Rofii & Ardyan, 2017, Hal. 303).

Pengukuran variabel Pertumbuhan Ekonomi ini diukur dengan skala rasio. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2015). Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan perhitungan:

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

### **3.5. Pengertian Rasio**

Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan, dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan.

### **3.5.1. Rasio Aktivitas Belanja Modal**

Rasio Aktivitas Belanja Modal merupakan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemda/pemkot memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

### **3.5.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

### **3.5.3. Rasio Pertumbuhan Ekonomi**

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2016). Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah/pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan)

Operasionalisasi Variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasional Variabel dapat dilihat dari dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Belanja Modal (X1)	Rasio Aktivitas Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X2)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Dana Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi	Rasio Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB\ 1 - PDRB\ 0}{PDRB\ 0} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi, 2014

### 3.6. Metode Penarikan Sampel

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi adalah sampel. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020.

### 3.7. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data yang dihimpun adalah data belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

Semua data diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data dari website Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor (<https://bogorkota.bps.go.id/>), dimana kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada periode 2015 sampai dengan tahun 2020.

### 3.8. Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:206) mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis Kuantitatif, dimana datanya berbentuk angka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang terdiri dari beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Untuk melihat pengaruh Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, adapun model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

### **Keterangan**

Y	= Pertumbuhan ekonomi
$\alpha$	= Konstanta
b1	= Koefisien regresi belanja modal
b2	= Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
X1	= Belanja modal
X2	= Pendapatan Asli Daerah
e	= Error term

Berikut ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis regresi linier berganda, dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Metode data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi berganda dengan bantuan software spps. Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Untuk dapat mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan pengujian dengan pendekatan Kolmogorow-Smirnow. Jika signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika signifikan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

#### 3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara variabel independen dengan menggunakan tolerance dan varians inflating factor (VIF). VIF merupakan suatu

jumlah yang menunjukkan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lain dalam persamaan regresi.

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan kriteria berikut ini:

- Jika  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas Jika  $VIF > 10$ , maka terjadi multikolinearitas
- Jika  $tolerance > 0.01$ , maka terjadi multikolinearitas
- Jika  $tolerance < 0.01$ , maka tidak terjadi multikolinearitas

#### 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t$  sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu menggunakan uji runs test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji runs test, yaitu:

- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $<$  dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $>$  dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### 5. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan uji scatterplot. Dengan kriteria pengujian yaitu apabila penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah dan titik- titik data tidak mengumpul maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 3.9. Pengujian Hipotesis

#### 3.9.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut.

### 3.9.2. Uji Signifikan Simultan (Uji *F*)

Uji *F* ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel- variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan derajat kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditolerir dalam penelitian ini yaitu  $\alpha = 0,05$

Kriteria dalam pengujian ini:

- 1) Berdasarkan nilai signifikansi (Sig)
  - a) Apabila nilai signifikansi yang diperoleh  $<$  dari  $\alpha = 0,05$ , maka semua variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
  - b) Apabila nilai signifikansi yang diperoleh  $>$  dari  $\alpha = 0,05$ , maka semua variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
- 2) Berdasarkan perbandingan nilai dengan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ 
  - a) Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka semua variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
  - b) Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka semua variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

### 3.9.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-*t*)

Uji ini dilakukan dengan cara pengujian variabel- variabel independen secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam hal ini ada dua acuan yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan:

- 3) Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.)
  - a) Jika nilai Signifikansi  $<$  0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima.
  - b) Jika nilai signifikansi  $>$  0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak.
- 4) Berdasarkan perbandingan nilai dengan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ 
  - a) Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima
  - b) Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020. Pemerintah Kota Bogor yang menjadi sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai mana telah dijelaskan dalam BAB III.

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor**

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada antara lain Prasasti Batu Tulis. Penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber berdasarkan urutan waktu seperti terdapat pada Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon Pakujajar, Menurut R. Ng. Poerbatjaraka (1921) Dalam tulisan De Batoe-Toelis bij Buitenzorg (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata “Pakuan” mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno “pakwwan” yang kemudian dieja “pakwan” (satu “w”, ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan “pakuan”. Kata “pakwan” berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti “istana yang berjajar”(aanrijen staande hoven). Sebutan “Pakuan”, “Pajajaran”, dan “Pakuan Pajajaran” dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Bogor berasal dari kata “buitnezorg” nama resmi dari penjajah Belanda selain itu terdapat pula kata “Bahai” yang berarti sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung) dan terdapat pula dokumen pada tanggal 7 April 1952 menuliskan “Hoofd Van de Negori Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor. Pada saat Indonesia merdeka atau telah mendapat pengakuan kedaulatan RI, Pemerintah Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-

Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS. Memiliki rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut dan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm membuat kota bogor memiliki rata-rata suhu tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C. Luas wilayah kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

#### **4.1.2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang**

##### **A. Visi Pemerintahan Kota Bogor**

Visi adalah rumusan umum mengenai suatu keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi maka segala sumberdaya dapat terarah, guna mewujudkannya dilaksanakannya melalui serangkaian kegiatan dan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Visi Daerah Kota Bogor yaitu “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional sebagai pendukung utama pemerintah daerah”

##### **B. Misi Pemerintah Kota Bogor**

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka di tetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah dan
2. Mengikatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pemaknaan tiga kata kunci yang terdapat pada misi diatas secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Akuntabel adalah instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintah, hukum atau keterbukaan, transparan, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabel adalah hal penting untuk menjamin nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas (terukur) dan predictabilities dari administrasi publik. Suatu akuntabel tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus ditanggung jawabkan.
- b) Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi data suatu pekerjaan tertentu. Profesional tidak berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus berkerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya

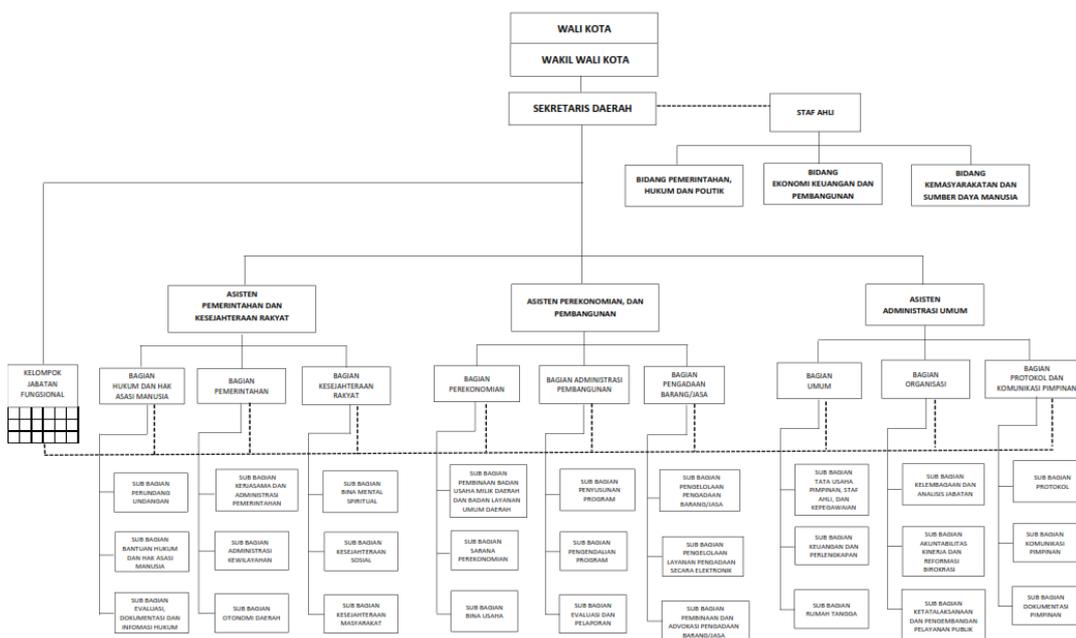
tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

- c) Pendukung Utama Pemerintah Daerah adalah BPKAD merupakan lembaga berperan sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### C. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dan juga pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut bagan struktur organisasi Kota Bogor.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 – Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor

#### **D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 459,40 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 322,50 miliar rupiah. Pada tahun 2020 Kota Bogor mengalami kontraksi ekonomi sekitar minus 0,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini disebabkan oleh penurunan produksi hampir di seluruh lapangan usaha akibat pandemi Covid-19.

Selama enam tahun terakhir (2015 - 2020) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing - masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor.

#### **4.1.3. Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **A. Belanja Modal Kota Bogor**

Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Selain itu, untuk melihat tingkat perkembangan belanja modal dengan menggunakan rasio aktivitas belanja modal (Mahmudi,2014.). Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar pengetahuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Ukuran Rasio Aktivitas Belanja Modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2014

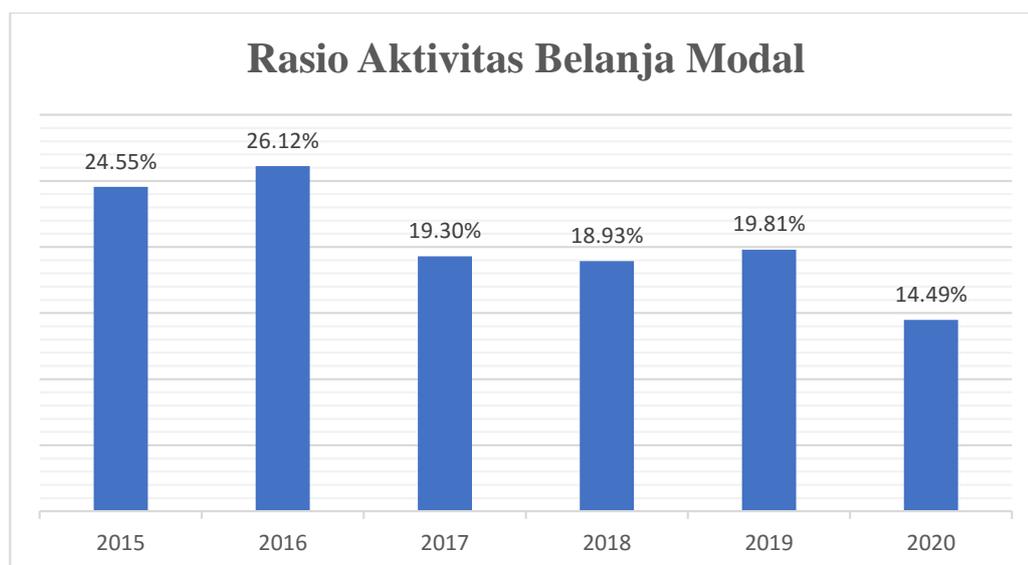
Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Realisasi Belanja Daerah	Rasio Aktivitas Belanja Modal
2015	500,64	2.039,48	24,55%
2016	552,48	2.115,30	26,12%
2017	433,49	2.245,59	19,30%
2018	455,46	2.406,59	18,93%
2019	500,98	2.528,44	19,81%
2020	276,16	2.354,87	14,49%

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Gambar 4.2 Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa rasio aktivitas belanja modal kota bogor tahun 2015-2020 cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 sebesar 24,55% dan mengalami kenaikan di tahun 2016. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 26,12%. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan sebesar 19,30% dan 18,93%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,81% dan ditahun 2020 rasio aktivitas belanja modal mengalami penurunan sebesar 14,49%. Ada beberapa penyebab rasio aktivitas belanja modal di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 118,99M hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Bogor menurunkan biaya alokasi belanja

modal. Jika melihat dari data laporan keuangan, terlihat bahwa Pemerintah Kota Bogor melakukan pembelanjaan lebih pada beberapa belanja daerah pemerintah, seperti pada belanja barang dan jasa yang tercatat melebihi anggaran 2017 sebesar 11,04% atau 66,27M dari anggaran, ada pula belanja bunga Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 113,7% atau sebesar 0,69M dari anggaran. Pada laporan keuangan tahun 2018, terlihat bahwa Pemerintah Kota Bogor melakukan pembelian yang lebih pada beberapa belanja daerah pemerintah, belanja hibah tahun 2018 Pemerintah Kota Bogor tercatat melebihi anggaran sebesar 110,09% atau sebesar 10,91M dan belanja bantuan sosial juga tercatat melebihi anggaran sebesar 129,25% atau 8,77M dari anggaran tahun 2018. Pembelanjaan lebih tersebut mempengaruhi naiknya Realisasi Belanja Daerah. Sedangkan penurunan rasio aktivitas belanja modal pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi covid sehingga anggaran Belanja Modal dan Belanja Daerah diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor.

## B. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1).

Tabel 4.2. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Pendapatan Daerah
2015	617,07	840,34	369,62	1.827,03
2016	783,88	1.097,61	270,88	2.152,37
2017	978,20	1.072,49	238,68	2.289,37
2018	912,20	1.066,76	349,74	2.328,70
2019	1.015,88	1.106,49	437,48	2.559,85
2020	872,02	1.112,10	444,46	2.428,58

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	
2015	395,43	57,15	25,26	139,22	617,06
2016	492,14	62,73	33,11	195,90	783,88
2017	555,48	49,04	29,95	343,73	978,20
2018	592,98	48,42	26,77	244,03	912,20
2019	689,54	51,36	28,24	246,74	1.015,88
2020	509	35,01	31,93	296	872,02

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlakukan daerah (Halim, 2012). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitupula sebaliknya (Hamzah, 2008). Menurut Mahsun (2016), rasio kemandirian digunakan untuk lebih memahami seberapa besar tingkat kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Rasio dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan daerah serta pinjaman daerah. Ukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Dana Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2014

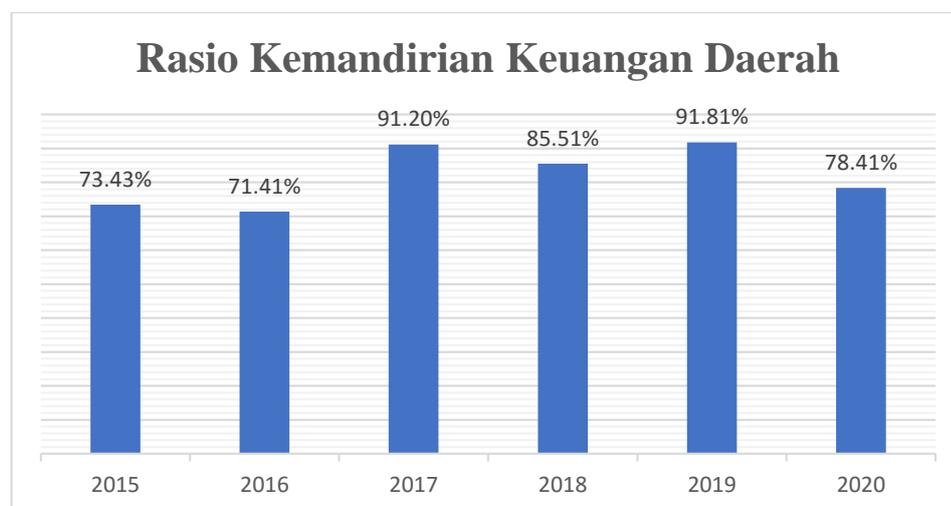
Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020 (miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Pinjaman	Rasio Kemandirian
2015	617,07	840,34	-	73,43%
2016	783,88	1.097,61	-	71,41%
2017	978,20	1.072,49	-	91,20%
2018	912,20	1.066,76	-	85,51%
2019	1.015,88	1.106,49	-	91,81%
2020	872,02	1.112,10	-	78,41%

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Tabel 4.5 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Rendah Sekali	0>25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi	>75%-100%

Sumber: Mahmudi, 2014.

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 di atas, rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kota bogor tahun 2015 sebesar 73,43% dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 71,41%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 91,20% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 85,51%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 91,81% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78,41%. Maka bisa dilihat pada tabel 4.5 mengenai skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 kemampuan keuangan daerah masuk kedalam kategori sedang dan tahun 2017-2020 kemampuan keuangan daerah masuk kedalam kategori tinggi. Rasio Pendapatan Asli Daerah turun pada tahun 2018 menjadi 85,51% disebabkan oleh Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Dana Transfer menurun dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 rasio Pendapatan Asli Daerah turun karena adanya pandemi covid sehingga anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor sehingga Pemerintah Kota Bogor memerlukan pengoptimalan agar dapat terus melampaui dari target yang dianggarkan.

### C. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Untuk melihat kemajuan perekonomian dengan melihat nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi PDRB merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari perkembangan suatu perekonomian di daerah. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Ukuran Rasio Pertumbuhan Ekonomi:

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2014

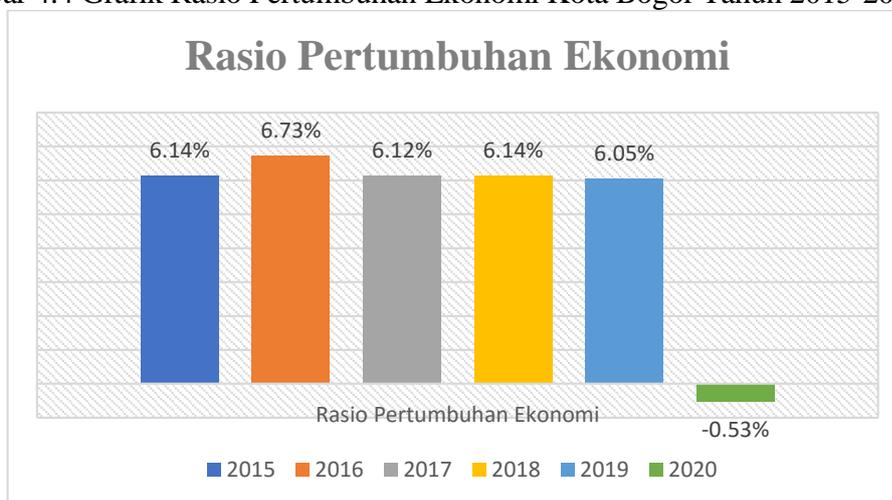
Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rasio Pertumbuhan Ekonomi
2015	252,98	6,14%
2016	270,02	6,73%
2017	286,54	6,12%
2018	304,13	6,14%
2019	322,50	6,05%
2020	320,83	-0,53%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis (2022)

Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.4 diatas, rasio pertumbuhan ekonomi kota bogor tahun 2015-2020 cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Rasio pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,14% sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,73%. Pada tahun 2017 rasio pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami penurunan dengan jumlah persentase 6,12%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,14%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Rasio pertumbuhan ekonomi terendah yaitu terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah presentase -0,53%, hal tersebut diakibatkan nilai PDRB di Kota Bogor pada tahun 2020 turun disebabkan oleh beberapa lapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda dan jasa lainnya mengalami menuruan pada laporan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sehingga menyebabkan nilai PDRB pada tahun 2020 menurun secara drastis dan adanya pandemic Covid-19 yang menyebab resersi ekonomi di Kota Bogor.

## 4.2. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dari variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya (variabel dependen) adalah Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor, sedangkan variabel bebasnya (variabel independen) adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut:

### 4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun cara yang digunakan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan pengujian dengan Kolmogorow-Smiwow.

Adapun dasar pengambilan uji Kolmogorow-Smiwow yaitu:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal

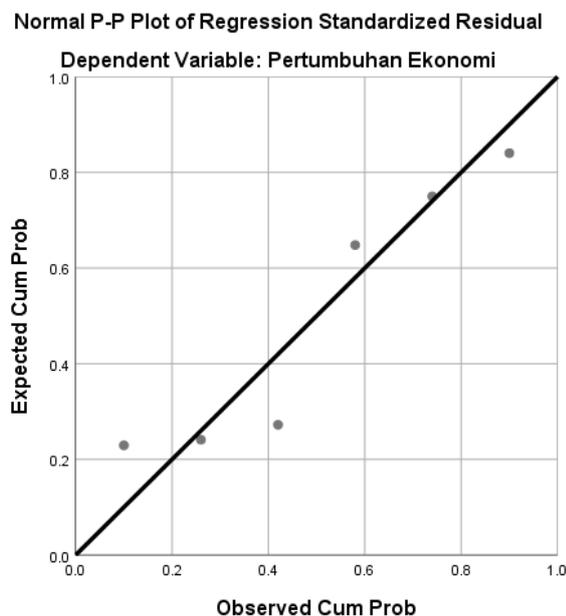
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	94.1323378
		6
Most Extreme Differences	Absolute	.283
	Positive	.283
	Negative	-.188
Test Statistic		.283
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25 (2022)

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25 (2022)

Dari tabel 4.7, dapat diketahui tingkat signifikan adalah 0,145 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa plotting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi dinyatakan normal.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah variabel regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (variance inflation factor). Model regresi yang baik tidak terjadi gejala multikolinieritas, jika nilai tolerance  $> 0,100$  dan nilai VIF  $< 10,000$  (Ghozali,2018).

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Belanja Modal	.948	1.055
	Pendapatan Asli Daerah	.948	1.055
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi			

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Dari hasil uji multikolinieritas diatas nilai Tolerance untuk variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 0,948 maka variabel independen lebih besar 0,100 ( $0,948 > 0,100$ ) dan Variance Inflation Factor (VIF) Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 1.055 maka variabel independen lebih kecil dari 10,000 ( $1.055 < 10,000$ ). Hal ini dinyatakan tidak ada gejala multikolinieritas.

### 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu menggunakan uji runs test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji runs test, yaitu:

- 1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-13.70256
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
a. Median	

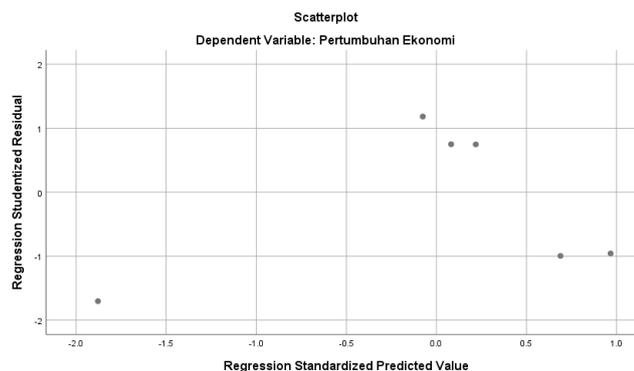
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar  $1.000 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan uji scatterplot. Dengan kriteria pengujian yaitu apabila penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah dan titik-titik data tidak mengumpul maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan dari gambar 4.2 di atas hasil uji heteroskeditas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai dalam penelitian.

#### 4.2.2. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah serta variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dapat dilakukan pengujian model regresi berganda dengan bantuan SPSS 25.

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1014.411	470.534		-2.156	.120
	Belanja Modal	.028	.006	.964	4.790	.017
	Pendapatan Asli Daerah	.003	.004	.160	.795	.484

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -1014.411 + 0.028 \text{ Belanja Modal} + 0.003 \text{ PAD}$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -1014.411 artinya apabila semua variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan (bernilai 0) maka Pertumbuhan Ekonomi bernilai sebesar -1014.411.
- Koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar 0.028 artinya apabila Belanja Modal naik sebesar 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.028 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.003 artinya apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka variabel

Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.003 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

### 4.2.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R<sup>2</sup> mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut.

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independent memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 <sup>a</sup>	.885	.808	121.52433
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal				
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 0.808. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mempengaruhi atau menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama sebesar 80% sisanya sebesar 20% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jika nilai Adjusted R Square semakin mendekati 1 menunjukkan variabel-variabel independent semakin baik untuk memprediksi variabel dependen, Dengan demikian masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain belanja modal dan pendapatan asli daerah.

#### 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai sig < 0,05 dan F hitung > F tabel, maka artinya variabel independent (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340290.348	2	170145.174	11.521	.039 <sup>b</sup>
	Residual	44304.485	3	14768.162		
	Total	384594.833	5			
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal						

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 11.521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 sedangkan nilai F tabel sebesar 5,14. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel (11,521 > 5,14) artinya secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

### 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dibagi 2 sisi menjadi 0,025 jika nilai Sig < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1014.411	470.534		-2.156	.120
	Belanja Modal	.028	.006	.964	4.790	.017
	Pendapatan Asli Daerah	.003	.004	.160	.795	.484
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) pada tabel 4.13 dapat disimpulkan:

1) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Belanja Modal (X1) sebesar 4,790 dengan signifikansi  $0,017 < 0,05$ . Hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,571 maka nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4,790 > 2,571$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 0,795 dengan signifikansi  $0,484 > 0,05$ . Hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,571 maka t hitung  $<$  t tabel ( $0,795 < 2,571$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### 4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor, maka dapat dilakukan pembahasan dan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H <sub>1</sub>	Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020	Diterima
H <sub>2</sub>	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020	Ditolak
H <sub>3</sub>	Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020	Diterima

Tabel 4.14 diatas menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak.

1. H<sub>1</sub>: Diterima

Variabel Belanja Modal (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Terlihat bahwa variabel belanja modal (X1) memiliki nilai Sig 0,017 kurang dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,571 maka t hitung  $>$  t tabel ( $4,790 > 2,571$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## 2. H2: Ditolak

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Terlihat bahwa variabel pendapatan asli daerah (X2) memiliki nilai Sig 0,484 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,571 maka  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $0,795 < 2,571$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor.

## 3. H3: Diterima

Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 11.521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 sedangkan nilai F tabel sebesar 5,14. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung  $> F \text{ tabel}$  ( $11,521 > 5,14$ ) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

### 4.3.2. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada Pemerintah Kota Bogor periode 2015-2020 yang menggunakan alat bantu SPSS versi 25 tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

#### A. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa perhitungan rasio aktivitas belanja modal Pemerintah Kota Bogor menunjukkan presentase yang belum stabil karena data menunjukkan fluktuasi (naik turun). Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 sebesar 24,55% dan mengalami kenaikan di tahun 2016. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 26,12%. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan sebesar 19,30% dan 18,93%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,81% dan ditahun 2020 rasio aktivitas belanja modal mengalami penurunan sebesar 14,49%.

Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Belanja Modal (X1), hasil perhitungan yang di dapat adalah nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas signifikansi yaitu  $0,017 < 0,05$  maka belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa  $t \text{-hitung} > t \text{-tabel}$  ( $t \text{-hitung } 4,790 > t \text{-tabel } 2,571$ ) maka hipotesis pertama diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (X1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Daulay (2020), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian kuantitatif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### **B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor**

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor menunjukkan presentase yang belum stabil karena data menunjukkan fluktuasi (naik turun). Pada tabel 4.5 mengenai skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 kemampuan keuangan daerah masuk kedalam kategori sedang dan tahun 2017-2020 kemampuan keuangan daerah masuk kedalam kategori tinggi. Rasio Pendapatan Asli Daerah turun pada tahun 2018 menjadi 85,51% disebabkan oleh Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Dana Transfer menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio Pendapatan Asli Daerah turun karena adanya pandemi covid sehingga anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor sehingga Pemerintah Kota Bogor memerlukan pengoptimalan agar dapat terus melampaui dari target yang dianggarkan

Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Pendapatan Asli Daerah (X2), hasil perhitungan yang di dapat adalah nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas signifikansi yaitu  $0,484 < 0,05$  maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $t\text{-hitung } 0,795 < t\text{-tabel } 2,571$ ) maka hipotesis kedua ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat PAD pada Pemerintah Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemic Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Hutagalung (2018), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Dearah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dengan metode penelitian kuantitaif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara.

### **C. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena berdasarkan analisis uji F dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 11.521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 sedangkan nilai F tabel sebesar 5,14. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung  $>$  F tabel ( $11,521 > 5,14$ ) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) variabel independen memiliki  $\text{sig} < 0,05$  yakni 0,039 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil dari Adjusted R Square sebesar 80% menjelaskan bahwa variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 80% dan 20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini, hal ini berarti variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena dilihat dari realisasi dan rasio belanja modal dan pendapatan asli daerah tersebut semakin meningkat disetiap tahunnya, yang menjelaskan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah tersebut berkontribusi sebesar 80% pada variabel pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Mutmainah (2020), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian secara simultan dan parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal memiliki t hitung sebesar sebesar 4,790 dengan signifikansi 0,017 kurang dari taraf nyata 0,05 dengan t hitung  $>$  t tabel ( $4,790 > 2,571$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis (H1) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 0,795 dengan nilai signifikansi 0,484 lebih dari taraf nyata 0,05 dengan t hitung  $<$  t tabel ( $0,795 < 2,571$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis (H2) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah memiliki F hitung sebesar 11.521 dengan nilai signifikansi 0,039 dibawah taraf nyata 0,05. Nilai F hitung  $11.521 >$  F tabel 5,14. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis (H3) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bogor diharapkan lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan Kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah agar pembangunan daerah Kota Bogor termasuk infrastruktur dapat berjalan lagi dan mewujudkan jasa dan industri pariwisata ekonomi kreatif dengan ditunjang oleh pembangunan yang baik. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat disamping PAD yang meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah diharapkan variabel independen yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi misalnya memasukkan variabel dana alokasi, dana bagi hasil dan lain sebagainya serta menambah wilayah penelitian sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Aditya, Dina Mei Eka, & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Prosiding SENDI\_U 2018*, 33, 631–639.
- Agus Susanto dan Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS Dan Lisrel Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Ibrahim Hasyim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: kencana prenatal media.
- Amal, Baharuddin & Junaidin. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Anggoro, D. D., & Alfandia, N. S. (2018). Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah. 13–23.
- Arini S, P. R. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 2(2).
- B. Uno, Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, Rifda Atiqoh. 2020. *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuh Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian keuangan, Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2020.
- Douglas A. Lind, Williyam & Samuel. 2018. *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit: Salemba Empat.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.

- Halim, Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, L. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3(1).
- Hermansyur, H. M., & Aditi, B. (2017). Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 32–43.
- Hutagalung, Damero Kristian. (2018) Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Universitas Negeri Medan.
- Indriyani P., Haryanto A., dan Herlisnawati D. (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok Periode 2011-2017. Universitas Pakuan Bogor, 2-8.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati, 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5 Nomor 2 hal 68-84.
- Mahmudi. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nurmainah, S. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Pad, P., Modal, B., & Pertumbuhan, T. (2021). *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI Volume 4. No. 3 (2021); Juli. 4(3)*.
- Palguno, M. D., & Valeriani, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018 Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15, 105–116.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 Bagan Akun Standar (BAS)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prabowo, Intan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha 2015-2020.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 173–186.
- Rofii, Andrik Mukamad, dan Putu, Sarda Ardyan. 2017. “Analisis Pengaruh Inflasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol.2 No.1. Hal: 303-316.
- Saragih, Reza Maulana. 2015. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, D. A., & Harsono, H. 2020. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Regional Economics*.
- Umara, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Utami, D. N., & Indrajaya, G. B. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- Wardhiah. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 61–70.
- Wiksuana, L. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali . *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Yuliana. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal AKuntansi & Keuangan*, 5(1), 33–48.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiana Raharni Putri  
Alamat : Perum. Pesona 1 Cilebut Blok G2 No 25, RT 07, RW  
13, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja,  
16710  
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 10 April 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Kebon Pedes 5 Kota Bogor  
• SMP : SMP PGRI 9 Kota Bogor  
• SMA : SMA PGRI 3 Kota Bogor  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 25 Juli 2022

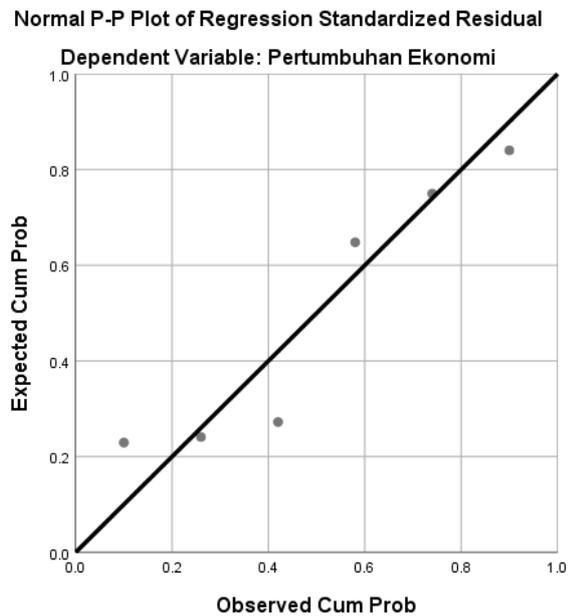
Peneliti,

Tiana Raharni Putri

## LAMPIRAN

Hasil perhitungan SPSS versi 25.

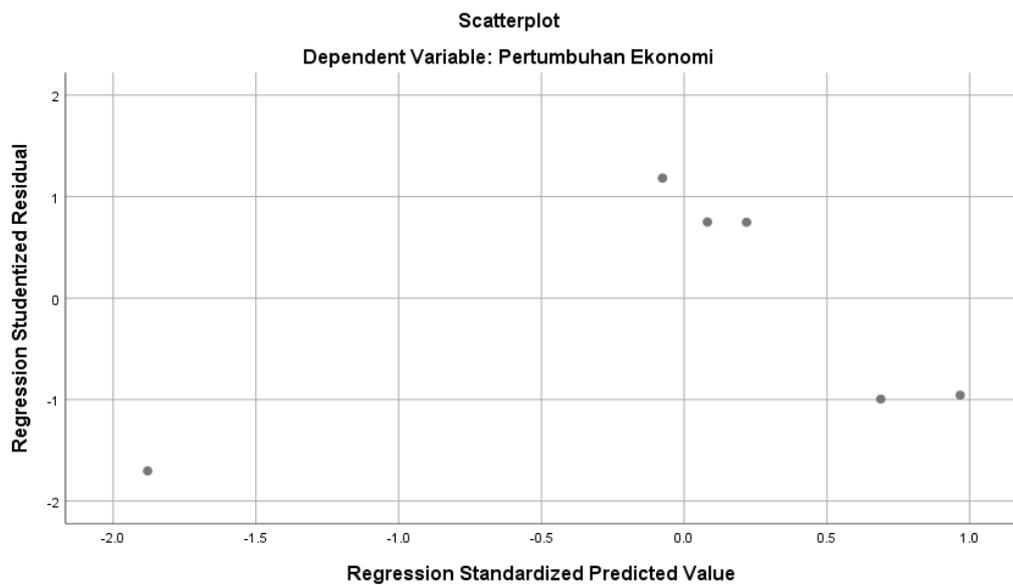
<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	94.1323378
		6
Most Extreme Differences	Absolute	.283
	Positive	.283
	Negative	-.188
Test Statistic		.283
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



Hasil perhitungan SPSS versi 25.

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1014.411	470.534		-2.156	.120		
	Belanja Modal	.028	.006	.964	4.790	.017	.948	1.055
	Pendapatan Asli Daerah	.003	.004	.160	.790	.484	.948	1.055

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



Hasil perhitungan SPSS versi 25.

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1014.411	470.534		-2.156	.120
	Belanja Modal	.028	.006	.964	4.790	.017
	Pendapatan Asli Daerah	.003	.004	.160	.795	.484
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 <sup>a</sup>	.885	.808	121.52433
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal				
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340290.348	2	170145.174	11.521	.039 <sup>b</sup>
	Residual	44304.485	3	14768.162		
	Total	384594.833	5			
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal						

Hasil perhitungan SPSS versi 25.

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-13.70256
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
a. Median	

# Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015



## PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2014 (AUDITED)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1	<b>2.022.270.761.216,00</b>	<b>1.913.210.404.036,00</b>	94,61	<b>1.757.697.381.840,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	627.815.080.243,00	627.597.050.141,00	99,97	544.835.708.254,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	387.811.965.615,00	398.435.398.328,00	102,74	376.487.551.008,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	59.064.233.000,00	46.219.894.849,00	78,25	77.167.650.951,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	26.404.407.715,00	28.807.740.268,00	109,10	23.681.532.602,00
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.1	<b>154.534.473.913,00</b>	<b>154.134.016.696,00</b>	99,74	<b>67.498.973.693,00</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.302.765.733.473,00	1.218.375.878.985,00	93,52	1.188.391.596.875,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	891.582.555.328,00	814.953.434.916,00	91,41	855.645.928.015,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.2	69.970.282.328,00	50.436.407.660,00	72,08	56.775.301.166,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	18.008.415.000,00	18.067.309.256,00	100,33	33.056.068.849,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.4	737.833.158.000,00	737.833.158.000,00	100,00	732.337.058.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2	65.770.700.000,00	8.616.560.000,00	13,10	33.477.500.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2	202.799.344.000,00	202.799.344.000,00	100,00	157.301.111.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	202.799.344.000,00	202.799.344.000,00	100,00	157.301.111.000,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3	208.383.834.145,00	200.623.100.069,00	96,28	175.444.557.860,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3	<b>208.383.834.145,00</b>	<b>200.623.100.069,00</b>	96,28	<b>175.444.557.860,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	91.689.947.500,00	67.237.474.910,00	73,33	24.470.076.711,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	3.000.000.000,00	4.875.000.000,00	162,50	1.034.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	5.1.2	<b>2.312.054.557.369,00</b>	<b>1.862.982.871.234,00</b>	80,58	<b>1.702.962.476.448,00</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1	<b>1.602.815.285.319,00</b>	<b>1.417.208.614.587,00</b>	88,42	<b>1.200.241.086.485,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.013.083.129.678,00	956.968.389.834,00	94,46	850.211.145.670,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	481.022.426.081,00	384.060.724.979,00	79,84	299.750.681.278,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.952.483.331,00	2.415.505.429,00	48,78	352.457.562,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	46.687.048.729,00	42.891.089.240,00	91,87	35.272.291.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	57.070.197.500,00	30.872.505.105,00	54,10	14.654.510.975,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2	<b>688.722.043.107,00</b>	<b>440.919.551.227,00</b>	64,02	<b>499.335.882.425,00</b>
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	59.375.785.000,00	8.347.295.355,00	14,06	100.909.168.329,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	112.392.390.967,00	88.426.943.379,00	78,68	89.106.799.170,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	155.120.933.947,00	95.466.281.082,00	61,54	71.680.596.235,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	360.133.755.877,00	247.091.808.411,00	68,61	227.606.419.678,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.699.227.316,00	1.587.223.000,00	93,41	10.032.899.013,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2014 (AUDITED)
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3	<b>19.309.977.788,00</b>	<b>3.855.084.200,00</b>	19,96	<b>2.533.275.000,00</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	19.309.977.788,00	3.855.084.200,00	19,96	2.533.275.000,00
2.4	<b>TRANSFER</b>	5.1.3	<b>1.207.251.155,00</b>	<b>999.621.220,00</b>	82,80	<b>852.232.538,00</b>
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	1.207.251.155,00	999.621.220,00	82,80	852.232.538,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.3	1.207.251.155,00	999.621.220,00	82,80	852.232.538,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(289.783.796.153,00)</b>	<b>50.227.532.802,00</b>	<b>(17,33)</b>	<b>54.734.905.392,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	5.1.4.1				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	301.640.954.314,00	301.204.906.314,00	99,86	302.181.957.954,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.4	300.704.906.314,00	300.704.906.314,00	100,00	294.245.909.954,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	936.048.000,00
		5.1.4.1	936.048.000,00	500.000.000,00	53,42	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	5.1.4.2				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	11.857.158.161,00	11.857.158.161,00	100,00	56.211.957.032,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.1.4.2.3	10.921.110.161,00	10.921.110.161,00	100,00	54.934.179.256,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	777.777.776,00
		5.1.4.2	936.048.000,00	936.048.000,00	100,00	500.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>289.783.796.153,00</b>	<b>289.347.748.153,00</b>	<b>99,85</b>	<b>245.970.000.922,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>339.575.280.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.704.906.314,00</b>

WALIKOTA



# Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2016



## PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.158.083.504.950,00	2.152.370.082.886,00	99,74	1.913.210.404.036,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	728.030.823.933,00	783.873.587.219,00	107,67	627.597.050.141,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	465.600.000.000,00	492.138.653.391,00	105,70	398.435.398.328,00
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	56.330.262.700,00	62.727.631.456,00	111,36	46.219.894.849,00
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	32.768.361.795,00	33.107.211.225,00	101,03	28.807.740.268,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	173.332.199.438,00	195.900.091.147,00	113,02	154.134.016.696,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.352.588.061.017,00	1.297.444.479.820,00	95,92	1.218.375.878.985,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.146.551.930.117,00	1.097.614.311.436,00	95,73	814.953.434.916,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	75.704.574.000,00	74.818.598.774,00	98,83	50.436.407.660,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	20.733.293.000,00	22.024.549.634,00	106,23	18.067.309.256,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	718.517.152.117,00	806.089.544.000,00	112,19	737.833.158.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	331.596.911.000,00	194.681.619.028,00	58,71	8.616.560.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	77.464.620.000,00	71.052.015.847,00	91,72	67.237.474.910,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	14.106.000.000,00	470,20	4.875.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	74.464.620.000,00	56.946.015.847,00	76,47	62.362.474.910,00
2	BELANJA	5.1.2	2.425.741.153.905,00	2.115.296.888.270,00	87,20	1.862.982.871.234,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.699.787.722.192,00	1.556.442.743.532,00	91,57	1.417.208.614.587,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.136.249.253.519,00	1.044.030.978.405,00	91,88	956.968.389.834,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	530.892.764.217,00	483.099.789.155,00	91,00	384.060.724.979,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.938.951.956,00	2.646.198.572,00	53,58	2.415.905.429,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	27.656.752.500,00	26.636.028.500,00	96,31	42.891.089.240,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	50.000.000,00	29.748.900,00	59,50	30.872.505.105,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	701.582.651.180,00	552.484.517.036,00	78,75	440.919.551.227,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.884.000.000,00	9.338.193.940,00	85,80	8.347.295.355,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	113.085.483.925,00	101.623.727.575,00	89,86	88.426.943.379,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	219.390.311.714,00	156.173.673.849,00	71,19	95.466.281.082,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	357.916.175.341,00	285.046.941.672,00	79,64	247.091.808.411,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	306.680.200,00	301.980.000,00	98,47	1.587.223.000,00

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	23.255.577.341,00	5.370.006.482,00	23,09	3.855.084.200,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	23.255.577.341,00	5.370.006.482,00	23,09	3.855.084.200,00
2.4	TRANSFER	5.1.3	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.3	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(267.657.648.955,00)	37.073.194.616,00	(13,85)	50.227.532.802,00
3	PEMBIAYAAN	5.1.4				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	340.511.328.955,00	340.597.623.600,00	100,03	301.204.906.314,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	339.575.280.955,00	339.661.575.600,00	100,03	300.704.906.314,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1.6	936.048.000,00	936.048.000,00	100,00	500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	72.853.680.000,00	72.853.680.000,00	100,00	11.857.158.161,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	71.917.632.000,00	71.917.632.000,00	100,00	10.921.110.161,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	936.048.000,00	936.048.000,00	100,00	936.048.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		267.657.648.955,00	267.743.943.600,00	100,03	289.347.748.153,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	304.817.138.216,00	0,00	339.575.280.955,00

WALIKOTA  
BIMA ARYA

# Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017



## PEREMINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2016 (AUDITED)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	2.311.874.306.346,00	2.289.359.362.675,33	99,03	2.152.370.082.886,0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	917.788.606.450,00	978.197.741.947,33	106,58	783.873.587.219,0
1.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	521.166.260.000,00	555.475.409.588,00	106,58	492.138.653.391,0
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.2	42.132.557.467,00	49.043.299.929,00	116,40	62.727.631.456,0
1.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.3	29.752.889.788,00	29.949.487.128,00	100,66	33.107.211.225,0
1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	324.736.899.195,00	343.729.545.302,33	105,85	195.900.091.147,0
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.367.515.899.896,00	1.293.505.562.261,00	94,59	1.297.444.479.820,0
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.143.528.373.156,00	1.072.486.473.770,00	93,79	1.097.614.311.436,0
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	94.689.511.214,00	90.543.462.995,00	95,62	74.818.598.774,0
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	22.024.549.634,0
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.2	835.715.338.942,00	791.929.143.000,00	94,76	806.089.544.000,0
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.1.3	213.123.523.000,00	190.013.867.775,00	89,16	194.681.619.028,0
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.1.4	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,0
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,0
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	223.987.526.740,00	221.019.088.491,00	98,67	199.830.168.384,0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	26.569.800.000,00	17.656.058.467,00	66,45	71.052.015.847,0
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	300,00	14.106.000.000,0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	23.569.800.000,00	8.656.058.467,00	36,73	56.946.015.847,0
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>					
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2	2.597.457.444.562,00	2.245.590.002.913,62	86,45	2.115.296.888.270,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	2.055.327.080.847,00	1.806.456.260.619,62	87,89	1.556.442.743.532,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.202.379.781.431,00	1.030.115.640.840,16	85,67	1.044.030.978.405,00
2.1.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	733.911.128.849,00	666.457.980.054,46	90,81	483.099.789.155,00
2.1.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	5.685.279.327,00	5.685.279.325,00	100,00	2.646.198.572,00
2.1.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	81.832.872.400,00	75.813.412.400,00	92,64	26.636.028.500,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	31.518.018.840,00	28.383.948.000,00	90,06	29.748.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	507.090.025.022,00	433.491.716.724,00	85,49	552.484.517.036,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	5.123.940.000,00	1.426.177.314,00	27,83	9.338.193.940,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	127.183.102.407,00	100.771.500.035,00	79,23	101.623.727.575,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	169.827.707.351,00	145.187.264.010,00	85,49	156.173.673.849,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	204.160.185.264,00	185.381.517.846,00	90,80	285.046.941.672,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	795.090.000,00	725.257.519,00	91,22	301.980.000,00

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2016 (AUDITED)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	28.079.575.767,00	2.270.085.956,00	8,08	5.370.006.482,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	28.079.575.767,00	2.270.085.956,00	8,08	5.370.006.482,00
2.4	TRANSFER	5.1.3	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.1	6.960.762.926,00	3.371.939.614,00	48,44	999.621.220,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(285.583.138.216,00)	43.769.359.761,71	(15,33)	37.073.194.616,00
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4	304.817.138.216,00	305.753.186.216,00	100,31	340.597.623.600,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1	304.817.138.216,00	304.817.138.216,00	100,00	339.661.575.600,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	0,00	936.048.000,00	0,00	936.048.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	19.234.000.000,00	19.234.000.000,00	100,00	72.853.680.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	19.234.000.000,00	19.234.000.000,00	100,00	71.917.632.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	936.048.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		285.583.138.216,00	286.519.186.216,00	100,33	267.743.943.600,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	330.288.545.977,71	0,00	304.817.138.216,00

  
 PIt. WALIKOTA  
 Ir. USMAR HARIMAN

# Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018



PEMERINTAH KOTA BOGOR  
**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.334.692.104.183,00	2.328.703.432.668,85	99,74	2.289.359.362.675,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	887.396.041.682,00	912.197.971.288,85	102,79	978.197.741.947,33
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	578.700.000.000,00	592.978.746.862,00	102,47	555.475.409.588,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	44.449.594.000,00	48.418.070.315,00	108,93	49.043.299.929,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	27.969.594.780,00	26.772.427.406,00	95,72	29.949.487.128,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	236.276.852.902,00	244.028.726.705,85	103,28	343.729.545.302,33
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.329.137.583.755,00	1.303.332.063.609,00	98,06	1.293.505.562.261,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.087.823.566.000,00	1.066.762.734.201,00	98,06	1.072.486.473.770,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	83.996.938.000,00	70.988.926.350,00	84,51	90.543.462.995,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	20.180.539.000,00	23.969.468.586,00	118,78	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00	100,00	791.929.143.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	191.716.946.000,00	179.875.196.265,00	93,82	190.013.867.775,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	118.158.478.746,00	113.173.397.771,00	95,78	17.656.058.467,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.126.747.546,00	87.142.218.371,00	94,59	9.000.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	26.031.731.200,00	26.031.179.400,00	100,00	8.656.058.467,00
2	BELANJA	5.1.2	2.656.280.650.160,71	2.406.586.936.843,04	90,60	2.245.590.002.913,62
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.118.814.639.370,71	1.945.851.266.176,04	91,84	1.806.456.260.619,62
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.195.970.034.526,71	1.108.690.038.689,00	92,70	1.030.115.640.840,16
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	749.808.967.659,00	672.795.038.324,21	89,73	666.457.980.054,46
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	7.000.000.000,00	6.598.058.977,83	94,26	5.685.279.325,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	122.276.492.285,00	118.993.313.285,00	97,31	75.813.412.400,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	43.759.144.900,00	38.774.816.900,00	88,61	28.383.948.000,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	512.432.788.564,00	455.461.723.593,00	88,88	433.491.716.724,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.111.980.000,00	9.314.649.200,00	92,11	1.426.177.314,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	111.358.670.675,00	101.665.269.154,00	91,30	100.771.500.035,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	71.633.896.252,00	66.483.846.768,00	92,81	145.187.264.010,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	316.573.318.774,00	276.223.614.766,00	87,25	185.381.517.846,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.754.922.863,00	1.774.343.705,00	64,41	725.257.519,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
2.4	TRANSFER	5.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(321.588.545.977,71)</b>	<b>(77.883.504.174,19)</b>	<b>24,22</b>	<b>43.769.359.761,71</b>
3	PEMBIAYAAN	5.1.4				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	333.288.545.977,71	388.671.502.466,71	116,62	305.753.186.216,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	330.288.545.977,71	330.288.545.977,71	100,00	304.817.138.216,00
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.4	0,00	55.640.573.400,00		0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	3.000.000.000,00	2.742.383.089,00	91,41	936.048.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	11.700.000.000,00	54.223.415.589,00	463,45	19.234.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	100,00	19.234.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	3.000.000.000,00	45.523.415.589,00	1.517,45	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>321.588.545.977,71</b>	<b>334.448.086.877,71</b>	<b>104,00</b>	<b>286.519.186.216,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>256.564.582.703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>330.288.545.977,71</b>



# Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019



## PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	104,45	912.197.971.288,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	644.546.554.586,00	689.543.006.040,00	106,98	592.978.746.862,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	96,10	48.418.070.315,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	100,56	26.772.427.406,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	100,08	244.028.726.705,85
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.577.997.671.710,00	1.455.644.350.874,00	92,25	1.303.332.063.609,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.066.762.734.201,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	73.713.874.000,00	53.495.246.384,00	72,57	70.988.926.350,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	856.297.349.000,00	838.948.449.000,00	97,97	791.929.143.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	204.362.379.000,00	189.891.532.535,00	92,92	179.875.196.265,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	5.1.1.2	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	113.173.397.771,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	87.142.218.371,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	26.031.179.400,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.639.970.560.688,00</b>	<b>2.559.857.207.793,86</b>	<b>96,97</b>	<b>2.328.703.432.668,85</b>
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	90,59	1.945.851.266.176,04
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.303.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	90,67	1.108.690.038.689,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1	789.887.964.541,00	711.101.422.815,19	90,03	672.795.038.324,21
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	93,97	6.598.058.977,83
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1	85.099.234.000,00	79.149.334.000,00	93,01	118.993.313.285,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	92,75	38.774.816.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.593,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2	23.520.000.000,00	18.044.020.000,00	76,72	9.314.649.200,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2	162.100.280.110,00	144.703.165.317,00	89,27	66.483.846.768,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.109.630.240,00	1.910.823.018,00	90,58	1.774.343.705,00

2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2	716.921.000,00	655.385.000,00	91,42	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.871.218.762.599,52</b>	<b>2.526.504.949.919,19</b>	<b>87,99</b>	<b>2.402.870.069.719,04</b>
2.4	TRANSFER					
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	0,00	0,00	0,00	3.716.867.124,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00	0,00	3.716.867.124,00
2.5	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	0,00
2.5.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4	4.042.013.000,00	1.023.845.129,00	25,33	0,00
2.5.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.4	1.115.203.192,00	972.007.890,00	87,16	0,00
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>		<b>5.157.216.192,00</b>	<b>1.995.853.019,00</b>	<b>38,70</b>	<b>3.716.867.124,00</b>
	<b>BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>2.876.375.978.791,52</b>	<b>2.528.500.802.938,19</b>	<b>87,91</b>	<b>2.406.586.936.843,04</b>
			<b>(236.405.418.103,52)</b>	<b>31.356.404.855,67</b>	<b>(13,26)</b>	<b>(77.883.504.174,19)</b>
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	153,32	388.671.502.466,71
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.5.1	256.564.582.703,52	256.564.582.703,52	100,00	330.288.545.977,71
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.1	0,00	139.752.780.949,00	0,00	55.640.573.400,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	99,78	2.742.383.089,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	25.656.196.860,00	155.495.608.833,00	606,07	54.223.415.589,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2	20.159.164.600,00	16.000.000.000,00	79,37	8.700.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.2	5.497.032.260,00	139.495.608.833,00	2.537,65	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.2	0,00	0,00	0,00	45.523.415.589,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>236.405.418.103,52</b>	<b>246.306.520.997,52</b>	<b>104,19</b>	<b>334.448.086.877,71</b>
			<b>0,00</b>	<b>277.662.925.853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>256.564.582.703,52</b>



Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020

<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.434,34 M</b>	<b>2.428,58 M</b>
<b>PAD</b>	<b>1.083,41 M</b>	<b>872,02 M</b>
Pajak Daerah	733,28 M	509,04 M
Retribusi Daerah	60,83 M	35,01 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36,04 M	31,93 M
Lain-lain PAD yang sah	253,26 M	296,04 M
<b>TKDD</b>	<b>1.069,38 M</b>	<b>1.112,10 M</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.069,38 M	1.112,10 M
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>281,55 M</b>	<b>444,46 M</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	281,16 M	303,40 M
Pendapatan Hibah	0,40 M	141,06 M
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.604,49 M</b>	<b>2.354,87 M</b>
Belanja Pegawai	1.218,66 M	1.010,11 M
Belanja Barang dan Jasa	870,53 M	798,84 M
Belanja Modal	377,31 M	276,16 M
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>138,00 M</b>	<b>269,76 M</b>
Belanja Bunga	8,01 M	5,43 M
Belanja Hibah	55,92 M	93,23 M
Belanja Bantuan Sosial	57,93 M	43,69 M
Belanja Tidak Terduga	15,00 M	126,28 M
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M
Belanja Bantuan Keuangan	1,13 M	1,13 M
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-170,15 M</b>	<b>73,71 M</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>326,15 M</b>	<b>285,95 M</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>501,81 M</b>	<b>366,50 M</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169,31 M	277,64 M
Penerimaan Pinjaman Daerah	312,00 M	64,32 M
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,50 M	0,00 M
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,00 M	24,54 M
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>175,66 M</b>	<b>80,55 M</b>
Penyertaan Modal Daerah	14,16 M	24,30 M
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	161,50 M	56,25 M
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Bogor Tahun 2015-2020

Kategori	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	253 951,95	269 243,76	280 254,86
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	5 998 600,60	6 538 497,43	7 064 824,32
Pengadaan Listrik dan Gas	1 925 046,85	1 970 649,85	1 949 764,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31 953,59	36 037,10	40 954,36
Konstruksi	3 647 802,34	3 937 651,67	4 381 382,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 088 063,38	7 643 843,99	8 168 746,73
Transportasi dan Pergudangan	3 776 163,74	4 210 072,72	4 638 128,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 421 383,40	1 586 007,85	1 749 963,32
Informasi dan Komunikasi	1 521 416,21	1 710 356,52	1 967 765,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	2 145 643,26	2 475 163,85	2 748 406,76
Real Estat	716 268,71	782 754,92	846 549,44
Jasa Perusahaan	675 244,69	746 138,04	799 337,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	955 878,40	1 019 031,66	1 080 886,89
Jasa Pendidikan	907 452,16	997 674,59	1 072 300,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374 124,90	425 778,60	490 454,37
Jasa Lainnya	925 906,78	1 051 908,75	1 198 753,54
Jumlah	32 364 900,96	35 400 811,31	38 478 473,74

Kategori	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	293 700,70	305 493,20	317 861,10
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	7 840 380,20	8 351 600,10	8 285 399,30
Pengadaan Listrik dan Gas	1 917 407,30	1 967 250,10	1 814 864,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46 135,50	49 170,90	53 314,30
Konstruksi	4 937 626,30	5 615 544,00	5 283 735,70
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 697 451,70	9 388 980,40	8 967 697,20
Transportasi dan Pergudangan	5 252 716,10	5 988 705,30	5 765 779,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 008 792,50	2 199 470,30	2 269 202,70
Informasi dan Komunikasi	2 063 111,80	2 170 434,00	3 034 044,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	3 075 475,10	3 346 217,50	3 325 974,40
Real Estat	919 284,10	1 010 806,60	984 525,60
Jasa Perusahaan	890 568,60	1 046 281,00	935 529,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 174 496,70	1 239 619,00	1 202 430,40
Jasa Pendidikan	1 266 508,70	1 435 963,50	1 596 798,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	558 376,90	641 408,90	663 087,20
Jasa Lainnya	1 318 988,50	1 466 412,20	1 440 016,80
Jumlah	42 261 020,70	46 223 356,90	45 940 259,90